



LAPORAN BULANAN
BAGIAN DUKUNGAN PELAYANAN PENGADUAN
BULAN AGUSTUS 2016

Pendahuluan

Fungsi pokok Komnas HAM yang paling dikenal oleh rakyat Indonesia adalah menerima dan memeriksa kasus atau peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu Komnas HAM jelas berwenang untuk menerima pengaduan tentang peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran HAM, sepanjang pengaduan tersebut disampaikan sesuai dengan tata cara dan prosedur pengaduan yang telah ditentukan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, bersama ini dilaporkan serangkaian kegiatan dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Bagian Dukungan Pelayanan Pelayan Pengaduan dengan rincian sebagai berikut:

A. Laporan Data Penerimaan Pengaduan

Pada 1 sampai dengan 31 Agustus 2016, Komnas HAM melalui Subbagian Penerimaan dan Pemilahan Pengaduan telah menerima berkas pengaduan dengan jumlah **649 berkas**.

Adapun rinciannya sebagai berikut:

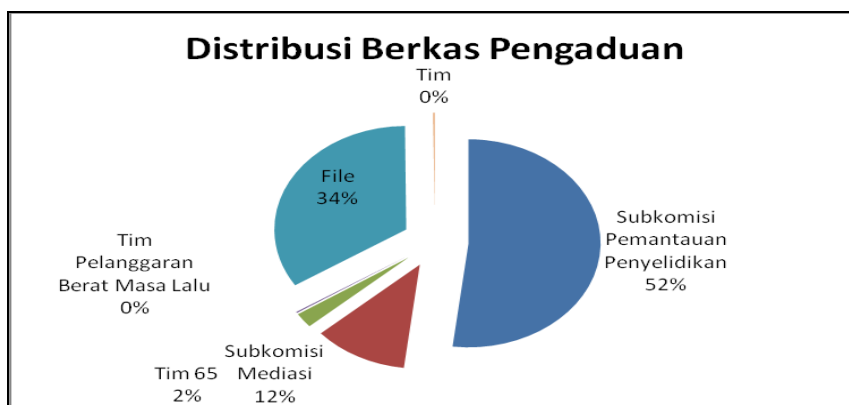
1. Wilayah asal pengadu / pelapor

No	Wilayah Asal Pengadu / Pelapor	Jumlah berkas	No	Wilayah Asal Pengadu / Pelapor	Jumlah berkas
1	Aceh	5	19	Nusa Tenggara Timur	11
2	Sumatera Utara	69	20	Kalimantan Barat	6
3	Bengkulu	5	21	Kalimantan Selatan	7
4	Jambi	8	22	Kalimantan Tengah	6
5	Riau	23	23	Kalimantan Timur	7

6	Sumatera Barat	51	24	Kalimantan Utara	0
7	Sumatera Selatan	15	25	Gorontalo	0
8	Lampung	1	26	Sulawesi Selatan	26
9	Kepulauan Bangka Belitung	2	27	Sulawesi Tenggara	10
10	Kepulauan Riau	7	28	Sulawesi Tengah	21
11	Banten	21	29	Sulawesi Utara	5
12	Jawa Barat	60	30	Sulawesi Selatan Barat	1
13	DKI Jakarta	139	31	Maluku	13
14	Jawa Tengah	31	32	Maluku Utara	0
15	Jawa Timur	53	33	Papua	6
16	Daerah Istimewa Yogyakarta	10	34	Papua Barat	1
17	Bali	7	35	Tanpa Alamat	11
18	Nusa Tenggara Barat	11			

2. Distribusi berkas pengaduan

No	Distribusi Berkas Pengaduan	Jumlah Berkas
1	Subkomisi Pemantauan Penyelidikan	337
2	Subkomisi Mediasi	75
3	Tim 65	15
4	Tim Pelanggaran Berat Masa Lalu	1
5	File	220
6	Tim Bentuk Sidang Paripurna	1
Jumlah		649



3. Jenis berkas pengaduan

No	Jenis Surat	Jumlah berkas
1	Langsung	322
2	Tembusan	322
3	Tidak ditujukan/ ditembuskan Ke KH	5
Jumlah		649

4. Cara penyampaian berkas

No	Cara Penyampaian	Jumlah berkas
1	Datang langsung	70
2	Pos	538
3	Fax	14
4	Email	18
5	Audiensi	4
6	Kondisi khusus / inisiatif	1
7	Diterima di lapangan / inisiatif / proaktif	4
Jumlah		649

5. Klasifikasi hak

No	Klasifikasi / Tema Hak	Jumlah berkas
1	Hak untuk hidup	25
2	Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan	0
3	Hak mengembangkan diri	5
4	Hak memperoleh keadilan	230
5	Hak atas kebebasan pribadi	18
6	Hak atas rasa aman	54
7	Hak atas kesejahteraan	246
8	Hak turut serta dalam pemerintahan	4
9	Hak perempuan	6
10	Hak anak	6
11	Hak tidak diperlakukan diskriminatif	4
12	Non HAM	51
Jumlah		649

5.1. Klasifikasi pengaduan

I. Hak Untuk Hidup	Jumlah berkas
Mempertahankan hidup	7
Lingkungan hidup	18
Jumlah	25
II. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan	Jumlah berkas
Pengabaian hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan	0
Jumlah	0
III. Hak mengembangkan diri	Jumlah berkas
Hak atas pendidikan	4
Hak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya	1
Jumlah	5
IV. Hak memperoleh keadilan	Jumlah berkas
Kesewenang-wenangan proses hukum di kepolisian/militer/PPNS	176
Kesewenang-wenangan proses hukum di kejaksaan	8
Kesewenang-wenangan proses hukum di peradilan	40
Kesewenang-wenangan pemenuhan hak terhadap warga binaan / narapidana	6
Jumlah	230
V. Hak atas kebebasan pribadi	Jumlah berkas
Keutuhan pribadi	1
Kebebasan beragama dan berkeyakinan	10
Berkumpul, berapat, dan berserikat	3
Mendirikan Parpol, LSM dan organisasi lainnya	1
Bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal dalam wilayah RI	3
Jumlah	18
VI. Hak atas rasa aman	Jumlah berkas
Perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya	7

Hak atas rasa aman, tenteram, dan perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu	15
Hak atas kebebasan gangguan terhadap tempat tinggal	8
Bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan	18
Bebas dari kesewenang-wenangan penangkapan, penahanan, pengucilan, pengasingan, atau pembuangan	6
Jumlah	54
VII. Hak atas kesejahteraan	Jumlah berkas
Hak untuk mempunyai milik	23
Hak atas kepemilikan tanah	94
Tidak dipenuhinya syarat-syarat ketenagakerjaan	51
Tidak dipenuhinya syarat-syarat kepegawaian	21
Hak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak	41
Hak atas kesehatan	14
Pengabaian pemenuhan hak buruh migran	2
Jumlah	246
VIII. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan	Jumlah berkas
Hak dipilih dan memilih dalam pemilu	1
Hak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil	1
Hak mengajukan pengaduan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih	2
Jumlah	4
IX. Hak perempuan	Jumlah berkas
Hak mendapatkan perlindungan khusus berkaitan dengan fungsi reproduksi perempuan	3
Hak atas kesetaraan dengan suami	3
X. Hak anak	Jumlah berkas

Pengabaian terhadap hak mendapatkan perlindungan	2
Pengabaian terhadap hak untuk tumbuh kembang	4
Jumlah	6
XI. Hak untuk tidak diperlakukan diskriminatif	Jumlah berkas
Pemberlakuan perbedaan, pengecualian, pembatasan atau pemilihan berdasarkan ras dan etnis	4
Jumlah	4
Tidak ada turunan hak	Jumlah berkas
Non Ham	51

6. Klasifikasi korban

No	Klasifikasi Korban	Jumlah berkas
1	Individu - Orang seorang	313
2	Individu - Anak	10
3	Individu - Perempuan	15
4	Individu - Buruh migran	3
5	Individu - Pekerja / profesi	19
6	Individu - Ras dan etnis	1
7	Individu - Korban pelanggaran HAM masa lalu	8
8	Individu - Narapidana	2
9	Individu - Fakir miskin	1
10	Kelompok - Masyarakat	154
11	Kelompok - Pekerja / profesi	30
12	Kelompok - Masyarakat hukum adat	15
13	Kelompok - Ras dan etnis	1
14	Kelompok - Agama dan penghayat kepercayaan	7
15	Kelompok - Korban pelanggaran HAM masa lalu	5
16	Kelompok - Narapidana	2
17	Organisasi	2
18	Warga negara asing	4
19	Korporasi	5
20	Lembaga Pendidikan	2
21	Pemerintah Daerah	4
22	Lembaga Negara Non Kementerian	1
23	TNI	1
24	Tidak ada/ Tanpa Nama	44

7. Klasifikasi pihak yang diadukan

No	Klasifikasi Pihak Yang Diadukan	Jumlah berkas
1	Pemerintah pusat (Kementerian)	52
2	Pemerintah daerah	70
3	Lembaga legislatif	1
4	Lembaga negara (Non kementerian)	9
5	Lembaga peradilan	37
6	Kepolisian	199
7	TNI	28
8	Kejaksaan	16
9	Lembaga masyarakat dan / atau Rutan	4
10	Pemerintah negara lain	1
11	Korporasi	100
12	BUMN / BUMD	34
13	Lembaga pelayanan kesehatan	3
14	Lembaga pendidikan	13
15	Individu - Orang seorang	19
16	Individu - Pekerja / profesi	2
17	Kelompok - Masyarakat	10
18	Kelompok - Masyarakat adat	1
19	Kelompok - Ras dan etnis	1
20	Organisasi	3
21	Tanpa Keterangan Pihak yang diadukan	46

8. Laporan berkas pengaduan yang belum dan/atau tidak diteruskan ke Bagian Pemantauan atau Bagian Mediasi

Sejak 2014 Subbagian Penerimaan dan Pemilahan Pengaduan juga menyusun dan mengeluarkan surat dengan maksud untuk (a) meminta kelengkapan berkas sebagaimana diatur dalam pasal 90 UU No 39 Tahun 1999¹, (b) surat keluar untuk berkas file yaitu berkas yang tidak memenuhi syarat untuk dapat diprosesnya suatu berkas pengaduan sebagaimana diatur dalam pasal 91 UU No 39 Tahun 1999² dan dinilai sebagai berkas yang tidak dan/atau belum ditemukan adanya bentuk pelanggaran HAM, dan (c) ucapan terima kasih. Kegiatan ini tetap dilaksanakan sampai dengan Juni 2016 sebagai salah satu kegiatan reguler dari Subbagian ini dengan perincian sebagai berikut:

¹ Berkas dengan kategori kelengkapan berkas, segera setelah pengadu mengirimkan jenis kelengkapan berkas yang diminta, akan dikirimkan ke Bagian Pemantauan atau Mediasi

² Berkas dengan kategori file, tidak akan diteruskan ke Bagian Pemantauan atau Bagian Mediasi

Deskripsi berkas yang belum dan/atau tidak diteruskan ke Pemantauan atau Mediasi

Kategori surat keluar			Total jumlah berkas yang tidak diteruskan
Kelengkapan berkas	Bukan pelanggaran HAM	Ucapan terima kasih	
31	81	15	123

Surat keluar dari Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan ini diproses oleh Analis, diperiksa dan disetujui oleh Kabag. DPP, **diperiksa dan ditandatangani oleh Komisioner Otto Nur Abdullah.**

Jakarta, 1 September 2016

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

a.n. KEPALA BIRO DUKUNGAN PENEGAKAN HAM

KEPALA BAGIAN DUKUNGAN PELAYANAN PENGADUAN

Rima Purnama Salim